

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

INSTANSI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

TUGAS : Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)

- FUNGSI :
1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
  2. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian dan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian.
  3. Penyiapan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan Kepegawaian Daerah.
  4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
  5. Penyiapan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
  6. Penyiapan dan penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah.
  7. Penetapan Gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
  8. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan koordinasi dengan Instansi terkait.
  9. Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Daerah dan penyampaian informasi kepada Badan Kepegawaian Negara.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Penataan PNS Berdasarkan Kompetensi dan syarat jabatan	<p>Terisinya formasi pegawai dan jabatan sesuai dengan kompetensi Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah jabatan struktural yang terisi.</li> <li>b. Persentasi terpenuhinya persyaratan pendidikan formal dalam jabatan, persyaratan pangkat dan persyaratan kompetensi pendidikan penjenjangan.</li> <li>c. Jumlah jabatan fungsional yang harus ada pada setiap SKPD.</li> <li>d. Persentasi jabatan fungsional yang telah sesuai dengan pendidikan formal.</li> </ol>	<p><b><u>Makna Indikator :</u></b> Dengan terisinya formasi PNS sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan maka kebutuhan organisasi akan terpenuhi dengan baik, pejabat yang menduduki suatu jabatan akan mempunyai kemampuan sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya.</p> <p><b><u>Alasan Pemilihan :</u></b> Dengan menargetkan terisinya formasi pegawai dan jabatan sesuai dengan kompetensi Aparatur diharapkan setiap pejabat yang menduduki jabatan telah memenuhi syarat untuk menduduki suatu jabatan sesuai kompetensinya.</p> <p><b><u>Cara Perhitungan Indikator :</u></b> Jumlah pejabat struktural yang menduduki jabatan dibanding jumlah formasi jabatan struktural yang ada. Jumlah pejabat yang telah megikuti Diklatpim dibanding dengan jumlah pejabat yang ada. Jumlah jabatan fungsional yang telah terisi dibanding jumlah formasi jabatan fungsional yang tersedia.</p>	BKD	BKD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya SDM Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur  Jumlah PNSD berdasarkan tingkat pendidikan formal, diklat. Bimtek dan sosialisasi.	<p><b><u>Makna Indikator :</u></b> Dengan meningkatnya kualitas SDM Aparatur maka akan menunjang individu PNS tersebut dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan lebih baik.</p> <p><b><u>Alasan Pemilihan :</u></b> Dengan menargetkan meningkatnya SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan maka diharapkan SDM Aparatur dapat meningkat kompetensinya dalam melaksanakan tugas sebagai PNS sesuai dengan tanggung jawab yang dimilikinya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p><b><u>Cara Perhitungan Indikator :</u></b> 1. Jumlah PNSD yang tugas belajar 2. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat, Bimtek dan Sosialisasi.</p>	BKD	BKD
3.	Terselenggaranya penerimaan CPNS	Terisinya formasi CPNS  Persentasi jumlah CPNS hasil seleksi dengan kebutuhan formasi	<p><b><u>Makna Indikator :</u></b> Dengan terisinya formasi CPNS pada setiap SKPD maka akan memperlancar pelayanan kepada masyarakat.</p> <p><b><u>Alasan Pemilihan :</u></b> Dengan menargetkan terselenggaranya penerimaan CPNS diharapkan formasi yang diusulkan dapat terisi sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.</p> <p><b><u>Cara Perhitungan Indikator :</u></b> Jumlah CPNS hasil seleksi dibandingkan jumlah kebutuhan formasi.</p>	BKD	BKD
4.	Meningkatnya disiplin pegawai sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah Penjatuhan Hukuman disiplin  Jumlah SKPD yang menyampaikan tembusan laporan penindakan pelanggaran disiplin tingkat ringan dan sedang.	<p><b><u>Makna Indikator :</u></b> Dengan meningkatnya disiplin PNS sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas maka kinerja pegawai akan meningkat serta kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai pegawai akan terpenuhi.</p> <p><b><u>Alasan Pemilihan :</u></b> Dengan menargetkan meningkatnya disiplin pegawai sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas diharapkan jumlah pelanggaran disiplin yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara akan menurun.</p> <p><b><u>Cara Perhitungan Indikator :</u></b> 1. Jumlah pegawai yang mendapat sanksi pelanggaran disiplin 2. Jumlah SKPD yang menyampaikan tembusan laporan penindakan disiplin.</p>	BKD	BKD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	Jumlah PNS yang Tugas Belajar dan Purna Praja yang mengikuti pendidikan yang mendapatkan bantuan	<p><b><u>Makna Indikator :</u></b>            Dengan meningkatnya Kualitas SDM Aparatur melalui Tugas Belajar/PNS atau Purna Praja yang mengikuti pendidikan yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan maka pembinaan pegawai dalam meningkatkan akuntabilitas akan terpenuhi.</p> <p><b><u>Alasan Pemilihan :</u></b>            Dengan menargetkan Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur diharapkan jumlah PNS yang Tugas Belajar dan Purna Praja yang mengikuti pendidikan yang mendapatkan bantuan dapat terpenuhi.</p>	BKD	BKD
			<p><b><u>Cara Perhitungan Indikator :</u></b>            Jumlah PNS yang mendapat bantuan pendidikan dibanding jumlah PNS dan Purna Praja yang mengikuti pendidikan.</p>		
6.	Meningkatnya Pengetahuan PNS tentang PP Nomor 53 Tahun 2010 dan PP Nomor 46 Tahun 2011	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	<p><b><u>Makna Indikator :</u></b>            Dengan meningkatnya Pengetahuan PNS tentang PP Nomor 53 Tahun 2010 dan PP Nomor 46 Tahun 2011 maka PNS akan lebih memahami dan mentaati peraturan tersebut.</p> <p><b><u>Alasan Pemilihan :</u></b>            Dengan menargetkan Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi tentang PP Nomor 53 Tahun 2010 dan PP Nomor 46 Tahun 2011 diharapkan dapat terlaksana Implementasi peraturan perundang undangan tersebut secara komprehensif dan berkesinambungan.</p> <p><b><u>Cara Perhitungan Indikator :</u></b>            Berapa kali Pelaksanaan Sosialisasi</p>	BKD	BKD

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

**H. MUHAMMAD TAUFIK, S.Sos. MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620522 198503 1 005**